

Persepsi Mahasiswa Dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Joko Widodo

Fadhilatul Amaliya¹, Anisa Fitriani Azizah², Dewi Sekar Pembayun³, Anindya Rahma Fathiya⁴, Tiara Jelita Andalusianti Roozan⁵, Kuswan Hadji⁶

Universitas Tidar

fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id, anisa.fitriani.azizah@students.untidar.ac.id,
dewi.sekar.pembayun@students.untidar.ac.id, anindya.rahma.fathiya@students.untidar.ac.id,
tiara.jelita.andalusianti.roozan@students.untidar.ac.id, kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract. Perception or point of view is a thought about something that is aimed at trusting opinions in terms of thoughts and views. In general and globally regarding objects related to various angles of the problem. Of course there will be many schools and considerations, one of which is that in this decade, various thoughts and points of view have emerged from students. Of course, where there is feedback on the nation's leadership milestones cannot be separated from the role and participation of students in responding to leadership. One of them was in the Joko Widodo era. Therefore, with the issues that arise, of course students must be wise in responding to the existence of a democracy-based leadership model, where democracy is a representation of the proclamation of the Indonesian nation. Various levels of society should also take part in providing responses. In generating a response, of course it is not only negative and existing shortcomings, but also how to generate good, correct and wise perceptions. With the expected output in the future, students can allocate and reflect on various aspects that will later be able to improve the nation and state in a clear, firm and straightforward manner.

Keywords: Perception, students, democracy, Jokowi

Abstrak. Persepsi maupun sudut pandang merupakan suatu pemikiran mengenai sesuatu hal yang ditujukan pada kepercayaan opini dalam segi pemikiran dan pandangan. Secara umum maupun global mengenai objek yang dikaitkan dengan berbagai sudut persoalan. Tentunya akan banyak aliran dan pertimbangan, salah satunya di era dekade ini muncullah berbagai pemikiran dan sudut pandang para mahasiswa. Tentu dimana adanya feedback pada tonggak kepemimpinan bangsa tidak lepas dari peran dan keikutsertaan mahasiswa dalam menanggapi suatu kepemimpinan. Salah satunya pada era Joko Widodo ini. Maka dari itu, dengan adanya isu-isu yang muncul tentunya para mahasiswa haruslah bijak dalam menanggapi adanya model kepemimpinan berbasis demokrasi, dimana demokrasi merupakan representasi dari proklamasi Bangsa Indonesia. Seyogyanya berbagai lapisan masyarakat juga turut andil untuk memberikan tanggapan. Dalam memunculkan suatu tanggapan tentunya tak hanya negatif dan kekurangan yang ada namun, bagaimana memunculkan persepsi yang baik, benar dan bijak. Dengan adanya output yang diharapkan di masa yang akan datang, mahasiswa dapat mengalokasikan dan merefleksikan melalui berbagai aspek yang nantinya mampu mendulang bangsa dan negara secara bernas, tegas dan lugas.

Kata kunci : Persepsi, mahasiswa, demokrasi, Jokowi

PENDAHULUAN

Mengenai munculnya berbagai pertanyaan publik, dalam kedudukan pemerintah khususnya pemegang kekuasaan dan pemerintahan, presiden menjadi salah satu faktor sentralistik dalam mendulang munculnya suatu kedaulatan. Dimana negara Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi. Pemaknaan demokrasi itu muncul berdasarkan kehendak atas rakyat. Semboyan yang kian melekat dari demokrasi yang berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ironisnya dalam kepemimpinan Jokowi yang melebihi satu dekade ini, jmlah muncul berbagai asumsi publik mengenai pemaknaan dan realisasi akan demokrasi ini. Apalagi kedudukan Presiden dapat dikatakan mutlak. Menjadikan sebagian pola pikir

masyarakat menjadi ambigu. Masyarakat dihadapkan dengan adanya berbagai situasi pelaksanaan pemerintahan. Mengenai berbagai latar belakang persoalan yang ada, menjadikan salah satu munculnya pemikiran aktif, yakni gerakan revolusi demokrasi. Berdasarkan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwasannya “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Tidak menutup kemungkinan adanya gerakan ini, menjadi salah satu reaksi para mahasiswa dalam mengikuti keikutsertaan sebab adanya kebijakan wewenang presiden. Dengan adanya jaminan hukum yang telah ada dan nyata inilah gerakan pemikiran persepsi mahasiswa dalam merefleksikan demokrasi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode normatif, yaitu dengan cara kami mengumpulkan beberapa data melalui internet, dan beberapa sumber referensi studi kepustakaan dengan merujuk kepada beberapa artikel, literatur, dan sumber hukum yang relevan dalam konteks judul yang kami angkat. Pada metode normatif ini termuat oleh beberapa sumber landasan yaitu;

1. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
2. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.¹
4. Pasal 1 ayat (3) yang membawa kewajiban sekaligus konsekuensi bahwa negara yang menjunjung tinggi hukum,tak terkecuali seluruh warga negara harus tunduk dan patuh oleh hukum di negara Indonesia.

B. Cara penelitian

¹ Mufti khakim 2017 "terkecuali seluruh warga negara harus tunduk dan patuh oleh hukum di negara Indonesia." (<https://eprints.uad.ac.id/9925/1/353-357%20Mufti%20Khakim.pdf> Diakses pada 26 April 2024.)

Pada penelitian ini kami mengumpulkan beberapa sumber data dari internet dan dari beberapa artikel yang memuat serta berkaitan dengan judul yang kami angkat. Dari sumber referensi tersebut kami jadikan sebagai bahan acuan dalam membuat jurnal ini. Kami mengulas sedikit dan melakukan pengembangan dari beberapa referensi yang kami cari.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana bentuk metode penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam konteks, makna, dan kompleksitas suatu fenomena, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi nuansa dan variasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa persepsi mahasiswa terhadap demokrasi dan kepemimpinan Joko Widodo di era pemerintahannya menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar mahasiswa mengakui adanya kemunduran demokrasi, terutama terkait dengan masuknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Namun, masih terdapat sebagian mahasiswa yang menganggap kepemimpinan Jokowi telah membawa kemajuan bagi Indonesia.

1. Persepsi terhadap Kemunduran Demokrasi

- a. Perubahan Konstitusi untuk Memungkinkan Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden

Sebanyak 81% responden mengkritik langkah Jokowi dalam mengubah Konstitusi untuk memungkinkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Mereka menganggap tindakan ini sebagai upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarganya, yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip rotasi kepemimpinan secara damai.²

- b. Keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Konstitusi berkaitan dengan batas usia menjadi capres dan cawapres yang awalnya minimal berumur 40

² Tria, Dianti & Arie, Firdaus. (2023). "Pencalonan Gibran sebagai cawapres picu kritik tentang dinasti politik." (<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/gibran-cawapres-picu-kritik-tentang-dinasti-politik-10232023113024.html>, Diakses pada tanggal 25 April 2024).

tahun, ketentuan tersebut menjadi siapa saja yang pernah menjabat menjadi pejabat pemerintah negara.

Sebanyak 74% responden menyoroti keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang merupakan paman dari Gibran, dalam proses perubahan Konstitusi tersebut. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini dianggap sebagai konflik kepentingan dan menodai independensi lembaga peradilan. Mereka mengutip prinsip pemisahan kekuasaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi.

c. Intervensi Pemilihan Umum untuk Menguntungkan Partai Penguasa

Sebanyak 62% responden mempersepsikan bahwa Jokowi mengintervensi pemilihan umum untuk menguntungkan calon dari partai penguasa, sehingga membatasi peluang oposisi untuk memenangkan pemilihan. Mereka menganggap tindakan ini sebagai ancaman terhadap kompetisi politik yang sehat dan prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil.

Sebagian besar mahasiswa mengutip pendapat Przeworski (2019) yang menyatakan bahwa demokrasi terkonsolidasi dengan baik jika norma-norma, prinsip, dan praktik demokrasi diterima oleh semua elit politik, lembaga, organisasi, dan masyarakat sipil.³ Mereka menganggap bahwa tindakan-tindakan Jokowi telah melanggar prinsip-prinsip tersebut dan mengancam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

2. Persepsi terhadap Kepemimpinan Jokowi dalam Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Meskipun terdapat kritik terhadap kemunduran demokrasi, sebanyak 54% responden masih mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dalam bidang-bidang lain, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pencapaian ekonomi.

a. Pembangunan Infrastruktur

Sebanyak 71% responden mengakui bahwa Jokowi telah berhasil mewujudkan visi dan misinya dalam membangun Indonesia dari daerah-daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan dianggap sebagai pencapaian signifikan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

b. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Sebanyak 68% responden mengapresiasi program-program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu

³ Agus, Maarif. (2024). "Kemunduran Demokrasi di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo: Studi Masuknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden 2024-2029." (<https://mahasiswaindonesia.id/kemunduran-demokrasi-di-era-kepemimpinan-presiden-joko-widodo-studi-masuknya-gibran-rakabuming-raka-sebagai-calon-wakil-presiden-2024-2029/>) Diakses pada tanggal 26 April 2024).

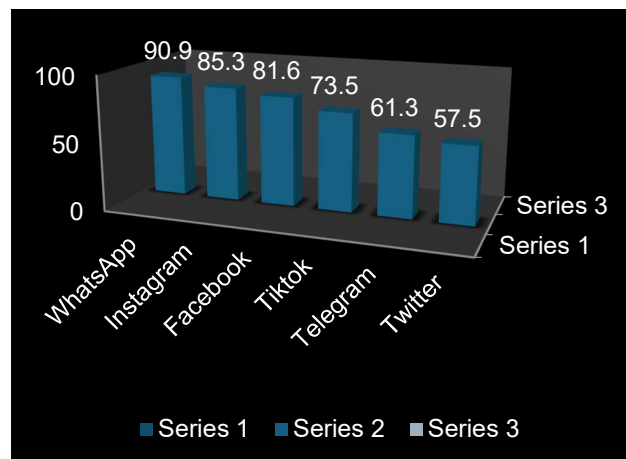
Sembako. Mereka menganggap bahwa program-program tersebut telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19.

c. Pencapaian Ekonomi

Sebanyak 59% responden mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan daya saing di kancah global. Mereka menilai bahwa stabilitas ekonomi merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

d. Kebijakan Politik Luar Negeri

Menurut We Are Social pada Januari 2024 mencatat 49,9% populasi di Indonesia merupakan pengguna media sosial dari jumlah keseluruhan populasi nasional, yang merupakan dampak dari politik luar negeri. Jika jumlah presentase di spesifikasikan, pengguna media sosial di Indonesia tercatat sebagai berikut:



Selain itu diplomasi ekonomi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kedaulatan wilayah juga menjadi prioritas pemerintah melalui politik luar negeri dalam upaya meningkatkan Indonesia sebagai negara dengan SDA yang melimpah dan menambah koneksi dengan negara-negara lain.⁴

3. Kritik terhadap Kinerja Jokowi dalam Bidang Lain

⁴ Cindy, Mutia, Annur. (2024). "10 Aplikasi Media Sosial yang Paling Banyak Dipakai Pengguna Internet di Indonesia (Januari 2024)." (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024> #Diakses pada tanggal 29 April 2024).

Meskipun mengapresiasi pencapaian dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sebagian mahasiswa juga mengkritik kinerja Jokowi dalam menangani masalah-masalah lain, seperti:

a. Pemberantasan Korupsi

Sebanyak 67% responden menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Jokowi masih belum optimal. Mereka menganggap bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan rakyat.

b. Kebebasan Pers

Sebanyak 55% responden mengkritik adanya pembatasan terhadap kebebasan pers di bawah kepemimpinan Jokowi. Mereka menganggap bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi dan harus dijunjung tinggi.

c. Penegakan Hukum

Sebanyak 61% responden menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum konsisten dan adil.⁵ Mereka menyoroti adanya kasus-kasus hukum yang tidak ditangani secara transparan dan berkeadilan, serta adanya indikasi intervensi politik dalam proses hukum.

Hasil penelitian ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai kepemimpinan dan demokrasi di era Jokowi. Di satu sisi, terdapat apresiasi terhadap pencapaian-pencapaian dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain, terdapat keprihatinan yang mendalam terhadap kemunduran demokrasi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian pembangunan dan penegakan demokrasi. Kepemimpinan yang efektif seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya polarisasi pandangan di kalangan mahasiswa terkait demokrasi dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagian besar mahasiswa mengkritik kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi, sementara sebagian lainnya mengapresiasi pencapaian-pencapaian dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan

⁵ Hana, Nurbaiti, Hasanah. "Tugas Ilmu Sosial Dasar." (<https://hanasky.blogspot.com/2016/01/tugas-ilmu-sosial-dasar-di-susun-oleh.html?m=1>, Diakses pada tanggal 26 April 2024)

rakyat. Perbedaan persepsi ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai kepemimpinan dan demokrasi di era Jokowi.

Kritik terhadap kemunduran demokrasi menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Mayoritas mahasiswa menyoroti adanya insiden-insiden yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu isu yang paling krusial adalah perubahan Konstitusi untuk memungkinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai wakil presiden. Sebanyak 81% responden mengkritik langkah ini karena dianggap sebagai upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarganya, yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip rotasi kepemimpinan secara damai.

Selain itu, keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang merupakan paman dari Gibran, dalam proses perubahan Konstitusi berkaitan dengan batas usia menjadi capres dan cawapres yang awalnya paling rendah 40 tahun sesuai ketentuan dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menjadi siapa saja yang pernah menjabat sebagai pejabat pemerintah negara, dan hal tersebut juga mendapat sorotan tajam. Sebanyak 74% responden menganggap hal ini sebagai konflik kepentingan dan menodai independensi lembaga peradilan. Mereka mengutip prinsip pemisahan kekuasaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah persepsi bahwa Jokowi mengintervensi pemilihan umum untuk menguntungkan partai penguasa. Sebanyak 62% responden mempersepsikan hal ini, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kompetisi politik yang sehat dan prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil.

Dalam mengkritik kemunduran demokrasi di era Jokowi, sebagian besar mahasiswa mengutip pendapat Przeworski (2019) yang menyatakan bahwa demokrasi terkonsolidasi dengan baik jika norma-norma, prinsip, dan praktik demokrasi diterima oleh semua elit politik, lembaga, organisasi, dan masyarakat sipil. Mereka menganggap bahwa tindakan-tindakan Jokowi telah melanggar prinsip-prinsip tersebut dan mengancam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, sebagian mahasiswa masih mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dalam bidang-bidang lain, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pencapaian ekonomi. Sebanyak 71% responden mengakui bahwa Jokowi telah berhasil mewujudkan visi dan misinya dalam membangun Indonesia dari daerah-daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Hal ini dianggap sebagai pencapaian signifikan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Selain itu, sebanyak 68% responden mengapresiasi program-program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Sembako.⁶ Mereka menganggap bahwa program-program tersebut telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, sebanyak 59% responden mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan daya saing di kancah global.

Tidak hanya itu, bentuk apresiasi mahasiswa juga melihat dari adanya kebijakan politik luar negeri era presiden Jokowi yang banyak merubah masyarakat dan memberi manfaat baik dari bidang ekonomi, teknologi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri, Indonesia memiliki 118 pejabat perwakilan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Di era pemerintahan presiden Jokowi, politik luar negeri dianggap sebagai inward looking yang sangat memprioritaskan kepentingan dalam negeri, juga turut serta dalam perjanjian internasional demi memperluas koneksi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang dimana perjanjian internasional tersebut haruslah berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, dan juga saling menguntungkan baik hukum nasional maupun internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Karena terdapat hal-hal yang menjadi prioritas berkaitan dengan politik luar negeri seperti, diplomasi ekonomi yang mendorong terbukannya pasar-pasar baru dengan mengeksport produk dalam negeri agar bisa dirasakan manfaatnya oleh negara lain, contohnya ekspor kopi, kakao, minyak kelapa sawit, hingga elektronika.⁷

Kedua, perlindungan WNI di luar negeri dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan sebanyak 51.088 kasus perlindungan WNI di luar negeri terselesaikan. Persepsi mahasiswa menganggap bahwa era pemerintahan presiden Jokowi menjadi era yang berani dan lebih peduli serta prioritas dalam menyelesaikan masalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi WNI. Yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara terutama

⁶ Saleha, Mufida., & Surryanto, Djoko, Waluyo. (2020). "Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi." INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 1 (2), 121-130, 2020

⁷ Sunaryo, Jona, Mahadana. 2023. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Perkembangan, Prioritas, dan Tantangan. Vol. 1 No 10 (2023): ADVANCE in Social Humanities Research." (<https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/>) 143 Diakses pada tanggal 29 April 2024).

pemerintah untuk melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Ketiga, prioritas dalam kedaulatan wilayah yang berkaitan dengan keamanan dan batas-batas wilayah antar negara seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang wilayah negara, baik itu batas wilayah daratan, lautan, maupun udara. Sehingga adanya koordinasi antar negara tentang batas-batas negara akan menjadi mudah dalam menentukan pemilik batas-batas negara.

Kebijakan politik luar negeri juga memunculkan persepsi mahasiswa akan dampak dari adanya politik luar negeri, yang sudah banyak sekali dirasakan oleh masyarakat dalam negeri seperti kebebasan dalam menggunakan media sosial. Dengan memiliki banyak koneksi dengan negara-negara lain memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam negeri agar bisa menggunakan media sosial untuk berbagai kepentingan bahkan hingga sarana menghasilkan uang. Pengguna media sosial dalam negeri menurut hasil penelitian tercatat sebanyak 49,9% dari populasi nasional. Apabila Indonesia menjadi negara yang tertutup tanpa menjalin hubungan dengan banyak negara, akan membuat masyarakatnya terbatas dalam melakukan apapun yang menjadi haknya dan kemungkinan kesejahteraan masyarakatnya akan sangat kurang.

Meskipun mengapresiasi pencapaian dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sebagian mahasiswa juga mengkritik kinerja Jokowi dalam menangani masalah-masalah lain, seperti pemberantasan korupsi, kebebasan pers, dan penegakan hukum. Sebanyak 67% responden menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Jokowi masih belum optimal.⁸ Yang mana terkait pemberantasan korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. Sementara 55% responden mengkritik adanya pembatasan terhadap kebebasan pers, padahal menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 fungsi pers diantaranya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, bahkan hingga menjadi control sosial. Selain itu, sebanyak 61% responden menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum konsisten dan adil.

⁸ Choky, Risda, Ramadhan. (2021). "Kebijakan pidana keras belum tentu cerdas: evaluasi kebijakan hukum pidana pemerintahan joko widodo 2014-2019." Jurnal Legislasi Indonesia 18 (3), 364-384, 2021.

Ketidakoptimalan tersebut memunculkan adanya indikasi intervensi politik dalam proses hukum.

Negara memiliki dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan penegakkan hukum, yaitu konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang membawa kewajiban sekaligus konsekuensi bahwa negara yang menjunjung tinggi hukum, tak terkecuali seluruh warga negara harus tunduk dan patuh oleh hukum di negara Indonesia.

Polarisasi pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai kepemimpinan dan demokrasi di era Jokowi. Di satu sisi, terdapat apresiasi terhadap pencapaian-pencapaian dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain, terdapat keprihatinan yang mendalam terhadap kemunduran demokrasi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian pembangunan dan penegakan demokrasi. Kepemimpinan yang efektif seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Hasil penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meskipun terdapat pencapaian dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, namun jika demokrasi terus mengalami kemunduran, hal ini dapat membahayakan stabilitas politik dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam menjamin bahwa norma-norma, prinsip, dan praktik demokrasi diterima oleh semua elit politik, lembaga, organisasi, dan masyarakat sipil.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat checks and balances antar lembaga negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga perlu memberikan jaminan terhadap kebebasan pers dan penegakan hukum yang adil dan konsisten, tanpa adanya intervensi politik.

Selain itu, pendidikan politik dan demokrasi bagi generasi muda, termasuk mahasiswa, menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, generasi muda dapat menjadi agen perubahan dan pengawas terhadap praktik-praktik yang melanggar nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai intelektual muda menjadi sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab untuk terus mengkritisi dan mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia, serta memberikan masukan dan solusi konstruktif untuk memperbaiki kondisi

yang ada. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi, maka konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat terus diperkuat.

Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal proses demokratisasi di Indonesia.⁹ Organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat menjadi pengawas independen terhadap kinerja pemerintah dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memperbaiki praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks global, Indonesia juga perlu memperhatikan tren demokrasi di dunia internasional. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional yang mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian pembangunan dan penegakan demokrasi dalam kepemimpinan nasional. Meskipun terdapat pencapaian dalam bidang infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, namun kemunduran demokrasi yang signifikan dapat membahayakan stabilitas politik dan sosial dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam memperkuat konsolidasi demokrasi, dengan melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Hanya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan supremasi hukum, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang makmur, adil, dan bermartabat.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa penilaian terhadap kepemimpinan presiden Joko Widodo dan kondisi demokrasi pada masa kepemimpinannya sangat kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan adanya polarisasi dalam penilaian di kalangan mahasiswa, di mana dalam waktu yang bersamaan ada yang memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat, namun di lain sisi, ada mahasiswa yang mengkritisi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar prinsip demokrasi.

⁹ Abdul, Rahman. (2022). *"Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia."* J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 1 (3), 139-150, 2022.

Namun, kritikan terkait kemunduran demokrasi justru lebih mendominasi hasil penelitian. Terlihat dari tidak terjaminnya pemenuhan prinsip-prinsip dasar demokrasi; pemisahan kekuasaan, ketertiban bernegara, dan kebebasan politik lewat variasi interpretasi terhadap pemanfaatan perubahan atas konstitusi sebagai potensi bagi kepentingan seseorang dan intervensi dalam pelaksanaan proses pemilu. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa masih menghargai pencapaian dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia saat di bawah kepemimpinan Jokowi.

Namun demikian, penilaian mereka tidak seluruhnya buruk. Sebagaimana terlihat, jika ada kemajuan dalam aspek pembangunan, namun ada keprihatinan yang muncul terkait dukungan dan penanganan masalah strategis lainnya seperti pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kebebasan beropini di media yang belum optimal. Sejarah kembali membuktikan bahwa penilaian terhadap kinerja pimpinan nasional di era ini tidaklah sederhana.

Sebagai generasi muda, partisipasi dan opini mahasiswa juga turut andil dalam memegang teguh konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini mencatat bahwa pembangunan tetap bisa dicapai sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan hak, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak asasi manusia, dan suapremasi hukum. Pemerintah masih memerlukan peningkatan integrasi pada sejumlah topik yang perlu dikhawatirkan, agar mendorong partisipasi publik dan lembaga independen guna menciptakan sistem check and balances yang sehat.

Oleh karena itu, dengan keterlibatan aktif dari mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai penjaga proses demokratisasi, konsolidasi demokrasi di Indonesia di masa mendatang pasti akan semakin kokoh. Namun, pemerintah juga harus mendengarkan berbagai masukan konstruktif dari elemen masyarakat yang beragam untuk memperbaiki kinerja dan memastikan demokrasi di negara itu sentosa. Ini akan menjadi penting karena itu memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik Indonesia dan terus mengukuhkan keberlanjutan negara di masa depan.

B. Saran

Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang persepsi mahasiswa. Dalam analisis data, dapat menggunakan analisis statistik yang lebih kompleks seperti regresi logistik untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang dipertimbangkan dengan persepsi mahasiswa. Selain itu, disarankan untuk memperluas analisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi mahasiswa, seperti pengaruh media sosial dan partisipasi politik. Untuk memperkaya hasil penelitian, dapat

ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi persepsi mahasiswa, seperti faktor kepedulian politik, partisipasi politik, dan pengaruh media sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Ranga Pandu. 2019. Mengukur capaian 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang politik. (<https://www.antaraneews.com/berita/1119148/mengukur-capaian-5-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-di-bidang-politik>). di akses 6 Mei 2020.
- Pratiwi, Ega. Dkk. 2019. Blusukan Wujud Kepemimpinan Demokratis (Studi Pada Era Kepemimpinan Jokowi). Malang : FIA UB.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
- Wahyuni, Reza. 2019. Kepemimpinan Demokrasi di Era Pemerintahan Jokowi. <https://www.kompasiana.com/rezawahyuni2338/5dc94f19d541df6efb4f5383/kepemimpinan-demokrasi-di-era-pemerintahan-jokowi>). Di akses 6 Mei 2020..
- Baiq Wardhani. 2023. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Variasi Gagasan Tradisional. Jurnal: Issues and Studies. Surabaya
- Sunaryo, Jona, Mahadana. 2023. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Perkembangan, Prioritas, dan Tantangan. Vol. 1 No. 10 (2023): ADVANCE in Social Humanities Research
- Cindy, Mutia, Annur. 2024. 10 Aplikasi Media Sosial yang Paling Banyak Dipakai Pengguna Internet di Indonesia (Januari 2024). Databoks. Katadata.co.id
- Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum
- Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjalinan Internasional
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
- Binsar, Tony. 2023. Strategi Polri guna penguatan konsolidasi demokrasi dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pemilu 2024. Lemhannas.go.id
- Maarif, Agus. 2024. Kemunduran Demokrasi di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo: Studi Masuknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden 2024-2029. Media Mahasiswa Indonesia
- Novianti, Mega. 2021. Etika Pemerintahan Zaman Nabi Muhammad SAW dan Zaman Joko Widodo, Sama atau Berbeda?. Media Mahasiswa Indonesia

- Simangunsong, Simon. 2017. Perubahan Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Permasalahan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014-2016. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017
- Zulkarnain dan Harris. 2017. Fenomena Blusukan Dalam Model Kepemimpinan Politik Joko Widodo. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan VOL. 13 No. 1. 2017